

**ANALISIS KETIMPANGAN INVESTASI
ANTAR PROVINSI DI PULAU SUMATERA DAN KALIMANTAN
TAHUN 2005-2013**

Oleh:

Sisca Hermayeni

Pembimbing : Hendro Ekwarso dan Dahlan Tampubolon

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : sisca.hermayeni@yahoo.com

*Disparities Analysis of Inter-Provincial Investment In Sumatra and Kalimantan
Year 2005-2013*

ABSTRACT

This study aims to analyze the Inter-Provincial Investment Disparities in Sumatra and Kalimantan. Where will the results of this study can be seen for what disparities. In addition to knowing imbalance occurs between regions or inter-region. The analysis used in this study is a qualitative analysis based on the theory as well as the opinions of experts who are already applicable to the public. The formula used in this research that Williamson index and Theil entropy index. From the calculation results obtained during the observation period (2005-2013) to the island of Sumatra and Kalimantan Island as follows: the average DDI and FDI imbalance Sumatra, DDI and FDI Kalimantan by using IW during the observation period (2005 -2013) are 0.0182, 0.0067, 0.0139, and 0.0055. Disparities average investment by Entropi Theil index for DDI and FDI Sumatra, DDI and FDI Kalimantan during the observation period (2005-2013) are 0.3204, 0.3403, 0.3598, and 0, 3258. By using the index calculation Williamson DDI disparities is greater than FDI. While using the Theil entropy index calculation DDI greater disparities occurs on the island of Kalimantan Island with a value of 0.3598 and FDI greater disparities occurred in Sumatra with a value of 0.3403. By looking at the average of the two regions Williamson index then we can conclude that the disparities of investment tends to be higher in Sumatra than on the island of Kalimantan.

Keywords: investment, population, investment imbalances, Williamson index, Theil entropy index

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara membutuhkan investasi dalam jumlah tertentu. Investasi berguna untuk melakukan kegiatan produksi dimana kegiatan produksi akan menghasilkan barang atau jasa. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, serta mencerminkan pembangunan ekonomi. Sehingga peranan investasi, baik investasi dalam negeri

maupun investasi asing menjadi penting dalam membangun perekonomian suatu negara. Setiap negara selalu berusaha menciptakan iklim yang kondusif guna mengundang investor agar mau menginvestasikan dananya di negara tersebut.

Investasi juga memegang peranan penting dalam mencapai pembangunan yang adil dan merata. Situasi penanaman modal di tanah air, tak luput dari masalah

ketidakmerataan. Ketimpangan investasi terjadi secara sektoral maupun regional. Selain memperhatikan aspek keseimbangan dan pemerataan, pembangunan juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemerataan modal fisik mutlak perlu dilakukan supaya tidak terjadi bias pembangunan pada daerah-daerah tertentu yang akan mengakibatkan ketimpangan antar wilayah semakin tinggi. Akumulasi modal fisik jangan sampai menumpuk di wilayah tertentu saja, guna mendorong pertumbuhan di wilayah lain, akumulasi modal juga perlu diarahkan ke wilayah lain (Bhinadi, 2003:46).

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) angka realisasi investasi PMDN di Pulau Sumatera tertinggi pada tahun 2013 yaitu Rp. 22.913,80 miliar dan angka realisasi terbesar terdapat di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar Rp. 5.068,90 miliar. Sedangkan untuk Pulau Kalimantan angka realisasi investasi PMDN pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 16.739,70 miliar dan angka realisasi terbesar terdapat di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar Rp. 5.889,30.

Angka realisasi investasi PMA jauh lebih kecil dibandingkan dengan PMDN. Hal ini tergambarkan dari jumlah PMA terbesar di Pulau Sumatera pada tahun 2012 hanya Rp. 3.729,30 miliar dan yang terbesar terdapat di Provinsi Riau. Sedangkan untuk realisasi investasi di Pulau Kalimantan terbesar terdapat pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 3.208,60 miliar. Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 mendapatkan investasi sebesar Rp. 2.014,10 miliar. Data tersebut menggambarkan

bahwa untuk Pulau Sumatera, Provinsi Riau memiliki daya tarik investasi yang lebih besar. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur memiliki daya tarik investasi yang lebih besar juga dibandingkan provinsi lain yang berada di Pulau Kalimantan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana ketimpangan investasi antar provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Apakah ketimpangan investasi terjadi inter-wilayah atau antar-wilayah di Sumatera dan Kalimantan.

TELAAH PUSTAKA

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan (Sukirno, 2000).

Menurut Tambunan (2006), terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi pada baik-tidaknya iklim berinvestasi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi, prasarana jalan, dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi serta adanya kepastian dari kebijakan pemerintah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi adalah infrastruktur yang baik, sumber daya manusia yang berkualitas, kemampuan menguasai teknologi, serta inovasi (Yusof, 2011: 71). Menurut Sukirno, (2000:149) ada lima faktor yang menentukan investasi antara lain:

a. Ramalan Mengenai Keadaan Dimasa Yang Akan Datang

Dalam menentukan apakah kegiatan-kegiatan yang dikembangkan itu akan memperoleh keuntungan atau akan menimbulkan kerugian, para pengusaha haruslah membuat ramalan/perencanaan untuk masa depan. Semakin baik keadaan masa depan, makin besar tingkat keuntungan yang akan diperoleh para pengusaha.

b. Tingkat Bunga

Tingkat bunga dapat mempengaruhi pengusaha untuk melakukan investasi sesuai yang direncanakan atau membatalkannya

c. Perubahan dan Perkembangan Teknologi

Pada umumnya makin banyak perkembangan teknologi yang dibuat, makin banyak pula kegiatan pembaharuan yang akan dilakukan. Makin tinggi tingkat investasi yang akan dicapai.

d. Tingkat Pendapatan Nasional Dan Perubahan-Perubahannya

Investasi berkecondongan untuk mencapai tingkat yang lebih besar apabila pendapatan nasional semakin besar jumlahnya. Sebaliknya investasi akan menjadi bertambah rendah apabila pendapatan nasional rendah, tidak berkembang dan bertambah rendah. Besarnya investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha ditentukan pula oleh tingkat perubahan-perubahan

pendapatan nasional dari tahun ke tahun.

e. Keuntungan Yang Dicapai Perusahaan

Apabila perusahaan-perusahaan melakukan investasi dengan menggunakan tabungan yang dicapai dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham, mereka tidak perlu membayar bunga keatasnya. Ini akan menurunkan biaya investasi yang dilakukan dengan memperbesar keuntungan menimbulkan suatu pengaruh lain atas investasi.

Investor cenderung menginvestasikan dananya ke daerah yang relatif kaya, karena lebih terjamin dan memberikan keuntungan yang besar. Sehingga dalam proses pembangunan, daerah miskin akan semakin sulit untuk berkembang menjadi daerah kaya atau semakin timpang.

Disparitas antar daerah tidak dapat dihindari akibat tidak terjadinya efek perembesan ke bawah (*trickle down effect*) dari *output* secara nasional terhadap masyarakat mayoritas bahkan sampai saat sekarang (reformasi). Ketimpangan investasi antar daerah merupakan topik yang perlu dikaji dengan memperhitungkan beberapa alasan. Dasar utama menariknya hal ini untuk diteliti karena ketimpangan merupakan hal yang dapat menghambat pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Investasi dapat memberikan efek multiplier bagi perekonomian daerah sehingga akan terjadi peningkatan tingkat kemakmuran masyarakat (Restiatun, 2009:95).

Ketimpangan wilayah dan pembangunan dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Hal ini

diindikasikan karena terjadinya ketidakmerataan jumlah investasi. Sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan ketimpangan ini (Sirojuzilam, 2008:37).

Adanya ketimpangan ekonomi antar provinsi disebabkan karena potensi sumber daya yang dimiliki antar provinsi satu dengan provinsi lainnya tidak merata dan tidak seragam, oleh karena itu pertumbuhannya pun dapat berbeda. Untuk dapat tumbuh secara cepat, suatu daerah perlu memilih satu atau lebih pusat-pusat pertumbuhan regional yang memiliki potensi paling kuat. (Yeniwati, 2013:11).

Penganut Model Neo-Klasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Akibatnya, pada saat itu modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan regional cenderung melebar (*divergence*). Akan tetapi bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Dengan demikian, nantinya setelah negara yang bersangkutan telah maju maka ketimpangan pembangunan akan berkurang (*convergence*), (Nurhuda, Khairul, dan Yuda, 2012:116).

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini menitik beratkan pada analisis ketimpangan investasi antar provinsi yang terjadi di 2 wilayah yaitu Pulau Sumatera dan Kalimantan

Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data yang bersifat kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka – angka. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui BPS (Badan Pusat Statistik) dengan rentang waktu 9 tahun (2005 - 2013). Disamping itu, data lainnya yang turut mendukung penelitian ini juga diperoleh dari sumber – sumber bacaan seperti jurnal, serta buku – buku referensi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan bahan-bahan kepustakaan berupa tulisan – tulisan ilmiah dan laporan – laporan penelitian ilmiah yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan melakukan pencatatan langsung berupa data *time series* dengan rentang waktu 9 tahun (2005 – 2013).

Indeks Williamson digunakan untuk menentukan besarnya ketimpangan investasi. Metode ini diperoleh dari perhitungan investasi perkapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah. Jika nilai indeks Williamson mendekati nol, maka tingkat kesenjangan distribusi investasi semakin kecil (semakin merata). Sebaliknya, jika nilai indeks Williamson semakin jauh dari nol maka kesenjangan semakin melebar (Kuncoro, 2004:127). :

$$Iw = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - Y)^2 / n}{y}$$

Dimana :

Iw = indeks Williamson

y_i = Investasi perkapita di daerah A/B

Y = total investasi perkapita provinsi

f_i = jumlah penduduk di daerah A/B
 n = total penduduk di provinsi

Hasil perhitungan dengan metode indeks Williamson di atas bersifat relatif karena pengukurannya semakin besar (mendekati 1), Maka ketimpangan akan semakin besar atau sangat tidak merata dan sebaliknya jika nilai semakin kecil (mendekati 0), maka ketimpangan kecil/ merata ($0 < IW < 1$) (Yuliadi,2012:9).

Untuk menghitung besarnya ketimpangan investasi antar wilayah maka dapat juga dihitung dengan Indeks Entropi Theil yaitu (Tampubolon, 2012:94):

$$T = \sum_{i=1}^u \frac{Y_i}{Y} T_i + \sum_{i=1}^u \frac{Y_i}{Y} \ln \frac{Y_i}{n_i} \frac{Y}{n}$$

$$= T_W + T_B$$

Dimana:

$$T_i = \sum_{j=1}^v \frac{y_{ij}}{Y_i} \ln \frac{y_{ij}}{n_{ij}} \frac{Y_i}{n_i}$$

$$T_W = \sum_{i=1}^u \frac{Y_i}{Y} T_i$$

$$T_B = \sum_{i=1}^u \frac{Y_i}{Y} \ln \frac{Y_i}{n_i} \frac{Y}{n}$$

Di mana:

y_{ij} = investasi perkapita provinsi j di wilayah i

Y_i = jumlah investasi perkapita wilayah i

Y = investasi perkapita Pulau Sumatera dan Kalimantan

n_{ij} = jumlah penduduk provinsi j di wilayah i

n_i = jumlah penduduk wilayah i

n = jumlah penduduk Pulau Sumatera dan Kalimantan

$T: 0 \leq T \leq 1$

T = mendekati 0, berarti ketimpangan semakin kecil (merata)

T = mendekati 1, berarti ketimpangan semakin besar (tidak merata)

Dengan indikator bahwa apabila semakin besar nilai Indeks Entropi Theil maka semakin besar ketimpangan yang terjadi sebaliknya apabila semakin kecil nilai indeks maka semakin merata (Umiyati, 2012:5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedadaan dan Perkembangan Investasi Perkapita di Wilayah Sumatera dan Kalimantan

Investasi dapat di tingkatkan apabila pemerintah dapat menciptakan iklim pembangunan yang kondusif seperti menjaga kestabilan ekonomi dan sosial masyarakat. Penanaman modal atau investasi dalam suatu perekonomian sangat diperlukan baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu upaya untuk menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia secara insentif sudah dilakukan oleh pemerintah. Agar pelaku ekonomi merasa aman dan tentram dalam melakukan aktivitasnya maka diperlukan stabilitas ekonomi dalam negeri, maka mempertahankan stabilitas ekonomi merupakan salah satu persyaratan untuk membangun dan mengerakkan roda perekonomian.

Jika dilihat berdasarkan tabel 5.1 maka Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi penyumbang investasi PMDN dan PMA pada tahun 2013 dengan total investasi mencapai 9.138,3 miliar dilanjutkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah investasi 8.559,8. Provinsi Riau menempati posisi

ketiga kemudian diikuti oleh Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan provinsi yang menyumbang investasi PMDN dan PMA terkecil adalah Provinsi Bengkulu dengan jumlah investasi 131,9 miliar.

Tabel 1 : Urutan Investasi (PMDN dan PMA) Menurut Provinsi pada Tahun 2013

No	Provinsi	Investasi (miliar rupiah)
1	Kalimantan Timur	9.138,3
2	Kalimantan Selatan	8.559,8
3	Riau	6.179,2
4	Sumatera Utara	5.956,4
5	Sumatera Selatan	3.881,9
6	Aceh	3.730,6
7	Kalimantan Barat	3.172,1
8	Jambi	2.833,9
9	Kalimantan Tengah	2.316,9
10	Lampung	1.372,1
11	Sumatera Barat	769,2
12	Kepulauan Riau	733,4
13	Bangka Belitung	720,6
14	Bengkulu	131,9

Sumber: Data olahan, 2014

Ketimpangan Investasi Perkapita Wilayah Sumatera dan Kalimantan

Indeks Williamson (IW) digunakan untuk mengetahui besarnya ketimpangan yang terjadi dalam suatu daerah tertentu yang pengukurannya berkisar antara 0 sampai 1. Jika IW dari hasil pengukuran semakin besar (mendekati 1) maka ketimpangan akan semakin tinggi atau semakin tidak merata dan sebaliknya apabila angkanya semakin kecil (mendekati 0) maka ketimpangan yang terjadi semakin akan merata. Untuk mengetahui dan menganalisis ketimpangan (*disparity*) investasi antara dua pulau objek penelitian yaitu Pulau Sumatera dan Kalimantan, maka digunakan rumus Indeks Williamson. Untuk menghitung Indeks Williamson maka

diperlukan data investasi perkapita dan jumlah penduduk. Setelah data tersebut diolah melalui rumus/formula yang ada maka diperoleh nilai Indeks Williamson yaitu untuk pulau Sumatera dan Kalimantan, dari tahun 2005-2013. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 : Nilai Indeks Williamson Investasi Perkapita Pulau Sumatera Tahun 2005-2013

Tahun	IW SUMATERA		IW KALIMANTAN	
	PMDN	PMA	PMDN	PMA
2005	0,0365	0,0088	0,0125	0,0010
2006	0,0168	0,0081	0,0133	0,0080
2007	0,0242	0,0078	0,0051	0,0038
2008	0,0137	0,0058	0,0073	0,0030
2009	0,0140	0,0057	0,0134	0,0040
2010	0,0096	0,0040	0,0240	0,0094
2011	0,0203	0,0049	0,0196	0,0047
2012	0,0165	0,0077	0,0144	0,0126
2013	0,0123	0,0079	0,0159	0,0030

Sumber: Data olahan, 2014.

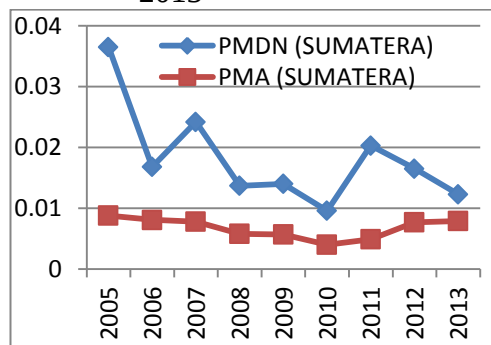
Dari tabel 5.2 dapat dilihat nilai Indeks Williamson (IW) investasi perkapita di Pulau Sumatera pada periode pengamatan cenderung kecil dari 1 (satu). Hal ini menunjukkan nilai IW investasi perkapita adalah tidak timpang baik berdasarkan PMDN maupun PMA. Nilai IW PMA jauh lebih kecil angkanya dibandingkan PMDN. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran investasi PMA lebih merata dibandingkan PMDN di Pulau Sumatera.

Pada tahun 2005 nilai Indeks Williamson PMDN angkanya paling besar yaitu sebesar 0,0355 jika dibandingkan tahun yang lain sedangkan tahun 2010 dengan nilai IW 0,0096 merupakan nilai terkecil. Untuk nilai Indeks Williamson PMA angka terbesar terjadi pada tahun 2005 dengan nilai IW 0,0088 dan

terkecil juga terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,0040.

Dari tabel 5.2 dapat dilihat nilai Indeks Williamson (IW) investasi perkapita di Pulau Kalimantan pada periode pengamatan cenderung kecil dari 1 (satu). Hal ini menunjukkan nilai IW investasi perkapita adalah tidak timpang baik berdasarkan PMDN maupun PMA. Nilai IW PMA jauh lebih kecil angkanya dibandingkan PMDN. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran investasi PMA lebih merata dibandingkan PMDN. Pada tahun 2010 nilai Indeks Williamson PMDN angkanya paling besar yaitu 0,0240 jika dibandingkan tahun yang lain sedangkan tahun 2007 merupakan nilai terkecil dengan nilai IW 0,0051. Untuk nilai Indeks Williamson PMA angka terbesar yaitu 0,0126 terjadi pada tahun 2012 dan terkecil terjadi pada tahun 2005 sebesar 0,0010.

Grafik 1: Nilai Indeks Williamson Investasi Perkapita Pulau Sumatera Tahun 2005-2013

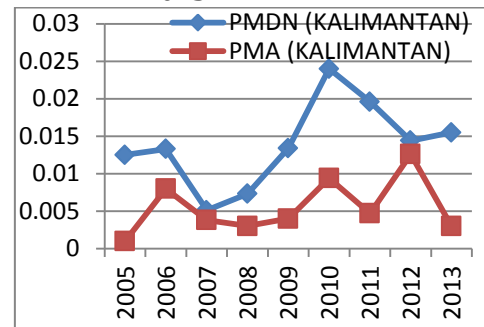


Sumber: Data olahan, 2014

Berdasarkan grafik 1 maka dapat terlihat bahwa ketimpangan PMDN jauh lebih besar dibandingkan PMA. Hal ini menjelaskan bahwa sebaran investasi PMA cenderung merata di setiap provinsi di Sumatera.

Grafik 2: Nilai Indeks Williamson Investasi Perkapita Pulau

Kalimantan Tahun 2005-2013



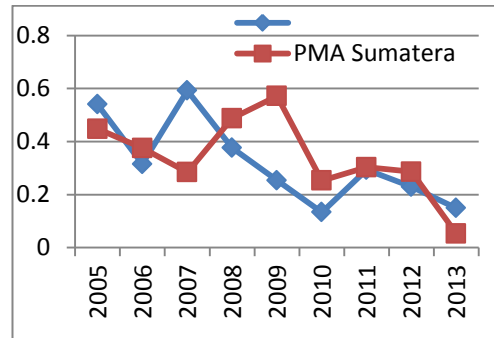
Sumber: Data olahan, 2014

Grafik 2 menggambarkan dengan lebih jelas kondisi ketimpangan di Pulau Kalimantan. Ketimpangan PMDN jauh lebih besar dibandingkan dengan ketimpangan PMA. Ketimpangan di Pulau Kalimantan lebih kecil dibandingkan ketimpangan di Pulau Sumatera.

Indeks Entropi Theil (T) digunakan untuk mengetahui besarnya ketimpangan yang terjadi dalam suatu daerah tertentu yang pengukurannya berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai Entropi Theil dari hasil pengukuran semakin besar (mendekati 1) maka ketimpangan akan semakin tinggi atau semakin tidak merata dan sebaliknya apabila angkanya semakin kecil (mendekati 0) maka ketimpangan yang terjadi semakin merata. Untuk mengetahui dan menganalisis ketimpangan (*disparity*) investasi antara dua pulau objek penelitian yaitu Pulau Sumatera dan Kalimantan, maka digunakan rumus Indeks Entropi Theil. Untuk menghitung Indeks Entropi Theil maka diperlukan data investasi perkapita dan jumlah penduduk. Setelah data tersebut diolah melalui rumus/formula yang ada maka diperoleh nilai Indeks Entropi Theil yaitu untuk pulau Sumatera dan Kalimantan, dari tahun

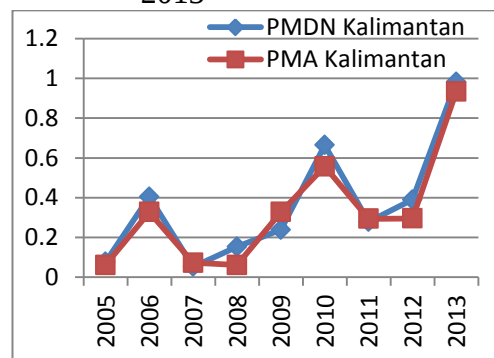
2005-2013. Untuk lebih jelas dapat dilihat grafik berikut.

Grafik 3: Nilai Indeks Entropi Theil Investasi Perkapita Pulau Sumatera Tahun 2005-2013



Sumber: Data olahan, 2014

Grafik 4: Nilai Indeks Entropi Theil Investasi Perkapita Pulau Sumatera Tahun 2005-2013



Sumber: Data olahan, 2014

Berdasarkan grafik 3 dan 4 menggambarkan kondisi ketimpangan di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang fluktuatif. Ketimpangan terendah pada PMDN Sumatera terjadi pada tahun 2010 dan tertinggi tahun 2007. Ketimpangan PMA di Sumatera terendah terjadi pada tahun 2013 dan tertinggi tahun 2009. Ketimpangan investasi PMDN di Pulau Kalimantan terendah terjadi pada tahun 2007 dan tertinggi pada tahun 2013, sedangkan ketimpangan investasi PMA terendah terjadi pada tahun 2005 dan tertinggi tahun 2013.

Tabel 3: Ketimpangan Rata-rata dengan menggunakan Indeks Entropi Theil Tahun 2005-2013

Ketimpangan rata-rata Wilayah	Tw	Tb	T
PMDN Pulau Sumatera	0,2369	0,0836	0,3204
PMA Pulau Sumatera	0,2780	0,0622	0,3403
PMDN Pulau Kalimantan	0,1455	0,2143	0,3598
PMA Pulau Kalimantan	0,1387	0,1872	0,3258

Sumber: Data Olahan, 2014

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian dalam penelitian yang dilakukan mengenai ketimpangan investasi perkapita antar Provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan tahun 2005-2013 maka dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Dari hasil analisis yang menggunakan Indeks Williamson dan Entropi Theil, menunjukkan bahwa ketimpangan investasi antar provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan tergolong rendah.
2. Berdasarkan perhitungan menggunakan Indeks Williamson, ketimpangan investasi PMDN yang terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan lebih besar dibandingkan PMA.
3. Dari hasil analisis yang menggunakan Indeks Entropi Theil, menunjukkan bahwa ketimpangan investasi PMDN antar provinsi di Pulau Kalimantan lebih timpang dibandingkan Sumatera. sedangkan ketimpangan investasi PMA lebih besar di Pulau Sumatera dibandingkan dengan Kalimantan.
4. Hipotesis Kurva U terbalik yang dikemukakan Kuznet tidak

terbukti baik di Pulau Sumatera maupun Kalimantan

5. Adanya perbedaan-perbedaan sumber daya alam, sarana dan prasarana yang kurang memadai juga menimbulkan ketimpangan investasi.

SARAN

Dengan melihat hasil penelitian maka penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Untuk mengurangi ketimpangan investasi antar provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan di upayakan untuk memprioritaskan investasi di masing-masing provinsi yang kurang memiliki investasi seperti Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah provinsi diharapkan lebih meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan yang berorientasi terhadap pemerataan sehingga ketimpangan (*disparity*) yang menjadi permasalahan pembangunan dapat dikurangi.
3. Ketimpangan investasi merupakan permasalahan yang sangat krusial di Indonesia, sehingga diharapkan Pemerintah Provinsi yang dapat mengawali peningkatan pemerataan investasi atau pembangunan melalui kebijakan-kebijakan yang *pro rakyat* antara lain ; *pro poor*, *pro job* dan *pro growth*.
4. Potensi Alam (*Natural Resources*) dan sumber daya manusia (*Human Resources*) yang terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan diharapkan dapat dipergunakan secara maksimal oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan investasi melalui peningkatan spesialisasi dalam menghasilkan

barang dan jasa, terutama untuk sektor-sektor unggulan/potensial yang menjadi andalan kedua Pulau.

5. Dalam merumuskan strategi pengembangan wilayah, diharapkan Pemerintah Provinsi dan Pudat dapat mendorong masyarakatnya untuk mengutamakan pengembangan disektor-sektor unggulan sehingga dapat mempertahankan sektor-sektor potensial di kedua wilayah tanpa mengabaikan sektor-sektor non basis.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Koordinator Penanaman Modal, 2005-2013. bkpm.go.id. Februari, 10, 2013.
- Bhinadi, Ardito, 2003. Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dengan Luar Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 8 (1) hal 39-48.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Penerbitan Erlangga. Jakarta.
- Nurhada, Rama, M.R. Khairul Muluk dan Wima Yudo Prasetyo, 2012. Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1 (4) hal 110-119.
- Restiatun, 2009. Identifikasi Sektor Unggulan dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi*

- dan Studi Pembangunan Vol 10 (1) hal 77-98.
- Sirojuzilam, 2008. Cross Border Spatial Cooperation Dalam Konteks Disparitas Ekonomi Wilayah Sumatera Utara. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah* Vol 4 (1) hal 37-41.
- Sukirno, Sadono, 2000. *Mekroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tambunan, Tulus. *Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan, dan Potensi*. Artikel dalam www.kadin-indonesia.or.id. Januari, 28, 2014.
- Tampubolon, Dahlan, 2012. Pembangunan Ekonomi dan Ketidakseimbangan Antara Wilayah di Sumatera Utara. *Tesis Pengajian Perbandaran Dan Perancangan Fakultas Sastra Dan Sains Sosial Universiti Malaya* hal 94.
- Umiyati, Etik, 2012. Analisis Tipologi Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Implementasi Otonomi Daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol 1 (5) hal 15-21.
- Yeniwati, 2013. Ketimpangan Ekonomi Antar Provinsi di Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi* Vol 2 (03), hal 1-21.
- Yuliadi, Imamudin, 2012. Kesenjangan Investasi dan Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.13 (2), hal 276-287.
- Yusof, Rohalia, 2011. Perkembangan Industri Nasional dan Peranan Penanaman Modal Investasi Asing. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* Vol 8 (1), hal 71-87.